



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2008 PASAL 6
TENTANG PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER**

*IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS
NUMBER 6 OF 2008 SECTION 6 LICENSING
AT THE UNIVERSITY CAMPUS ENVIRONMENT JEMBER*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

oleh

**Abrianto Havid S
NIM 060910291042**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2008 PASAL 6
TENTANG PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS JEMBER**

*IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATIONS
NUMBER 6 OF 2008 SECTION 6 LICENSING
AT THE UNIVERSITY CAMPUS ENVIRONMENT JEMBER*

Oleh

Abrianto Havid Setiawan

NIM 060910291042

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Inti Wasiati, MM

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Budiyo, M.Si

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Drs. H. Ach. Supardi M.Si dan Ibunda Hj. Supartiningsih S.Pd yang tercinta;
2. Kakak saya Andri Permana Wicaksono S.ST dan Adik saya Fathurrozi Winjaya tercinta;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTO

Ing ngarsa sung tuladha.
Ing madya mangun karsa.
Tut wuri handayani.
(Ki Hajar Dewantara)^{*)}

^{*)} Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan . 2001. *Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abrianto Havid Setiawan

NIM : 060910291042

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 September 2011

Yang menyatakan,

Abrianto Havid Setiawan

NIM 060910291042

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Oktober 2011

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Abdul Kholik Azhari, M.Si

NIP. 19590726 198902 1 001

Dra. Inti Wasiati, MM

NIP. 19530731 198002 2 001

Anggota Tim Penguji,

1. Drs. Budiyo ()
NIP. 19610331 198902 1 001
2. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos, M.Si ()
NIP. 19700322 199512 2 001
3. Suji, S.Sos, M.Si ()
NIP. 19790919 200812 2 001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP. 19520727 198103 1 003

RINGKASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember; Abrianto Havid S, 060910291042; 2011; 81 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tujuan penelitian adalah mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data skunder diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Jember. Sedangkan data primer diperoleh dengan wawancara mendalam, sedangkan banyaknya informan ditentukan dengan teknik *internal sampling*, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Untuk pedagang kaki lima sudah mengerti sebenarnya pedagang kaki lima dilarang, karena sudah menggunakan sarana umum, karena ini bukan hanya kebutuhan pedagang melainkan mahasiswa dan juga tempat relokasi yang belum ada akhirnya pedagang diperbolehkan berjualan asalkan menjaga kebersihan, dan membuat kartu anggota agar tidak ada tambahan PKL lagi. Dalam hal ini Satpol PP menyelesaikan dengan flexible, yaitu memperbolehkan mereka berjualan di sana padahal di Perda sudah jelas, bahwa PKL dilarang berjualan menggunakan sarana umum, karena alasan para PKL yaitu masalah perut dan itu juga kepentingan mahasiswa dan tentu juga tempat relokasinya belum ada, Satpol PPpun akhirnya mengalah, asalkan berjualan mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam setelah itu harus sudah bersih semua. Jadi kebijakan tersebut masih belum efektif, karena pada Perda sudah menjelaskan, setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Lingkungan Kampus Universitas

Jember masih belum efektif. Hal ini terjadi karena masih belum bisa terpenuhi, faktor tersebut adalah konsistensi, wewenang, dan (*Standart Operating Procedures, SOP*).

Masalah utama dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Wilayah Universitas Jember ini merupakan lahan relokasi, jadi dalam menyelesaikan masalah tersebut hendaknya Pemerintah secepatnya turun langsung untuk menyediakan lahan relokasi tersebut, karena semakin lama kondisi di jalan jawa maupun jalan kalimantan akan semakin padat oleh PKL, sehingga akan semakin mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan maupun trotoar. Sehingga Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 4 tentang wewenang Satpol PP dapat terlaksana dengan baik dan Perda akan dapat terimplementasikan dengan efektif.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember”. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya ini. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Sasongko, M. Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dra. Inti Wasiati, MM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara serta dosen pembimbing I dan dosen pembimbing akademik yang telah memberi dukungan, bimbingan, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Budiyono, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan waktu, bimbingan, dukungan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini serta selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
6. Teman-teman angkatan 2006 prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kasih sayang khususnya teman diskusi penulis, yaitu: Sony, Wisnu, Resti, Ajeng serta teman-teman yang tidak dapat

disebutkan satu per satu sehingga dapat membangun mental penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Kedua Orang Tuaku yakni Ayahanda Drs. H. Ach. Supardi M.Si dan Ibunda Hj. Supartiningsih S.Pd yang tercinta dan Kakak saya Andri Permana Wicaksono S.ST dan Adik saya Fathurrozi Winjaya tercinta yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil yang tak terhingga;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 15 September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTO	iii
PERNYATAAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Konsepsi Dasar	8
2.2 Konsep Kebijakan Publik	9
2.3 Konsep Implementasi Kebijakan	10
2.4 Model-model Proses Implementasi Kebijakan	11
2.4.1 Model Implementasi Kebijakan George Edwards III	11
2.4.2 Model Implementasi Kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier	17
2.4.3 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle ..	18
2.4.4 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	19

2.5	Kebijakan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008	
	Tentang Pedagang Kaki Lima	24
2.5.1	Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL).....	24
2.5.2	Tujuan dan Sasaran Program Kebijakan Peraturan Daerah	
	No 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima.....	25
2.5.3	Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 Pasal 6	
	Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima.....	26
BAB 3	METODE PENELITIAN	27
3.1	Tipe Penelitian	27
3.2	Obyek Penelitian	28
3.3	Lokasi Penelitian.....	29
3.4	Penentuan Informan	29
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6	Analisis Data	32
BAB 4	PEMBAHASAN	35
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Jember	35
4.2	Gambaran Umum Universitas Jember	37
4.3	Gambaran Umum Lokasi PKL Jawa dan Jalan Kalimantan	38
4.4	Satuan Polisi Pamong Praja	39
	4.4.1 Tugas pokok.....	39
	4.4.2 Fungsi.....	40
4.5	Gambaran Umum Implementasi Peraturan Daerah	
	Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima	
	(PKL) Di Wilayah Universitas Jember.....	41
4.5.1	Komunikasi	42
	4.5.1.1 Transmisi.....	43
	4.5.1.2 Kejelasan	46
	4.5.1.3 Konsistensi	48
4.5.2	Sumber-sumber Kebijakan.....	50
	4.5.2.1 Staf	50
	4.5.2.2 Informasi	52

4.5.2.3 Wewenang.....	53
4.5.2.4 Fasilitas fisik	56
4.5.3 Kecenderungan – kecenderungan	58
4.5.4 Struktur Birokrasi.....	59
4.5.4.1 Standart Operating Procedures (SOP).....	60
4.5.4.2 Fragmentasi	61
4.5.5 Efektifitas	63
4.6 Analisa Data	66
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Gambaran Variabel Komunikasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember khususnya Di Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan.....	49
Tabel 4.2 Jumlah Anggota lapangan Satpol PP Kabupaten Jember.....	51
Tabel 4.3 Sarana Transportasi Satpol PP Kabupaten Jember	56
Tabel 4.4 Gambaran Variabel Sumber-sumber Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember khususnya di jalan jawa dan Kalimantan	57
Tabel 4.5 Gambaran Variabel Kecenderungan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember khususnya di jalan jawa dan Kalimantan .	59
Tabel 4.6 Gambaran Variabel Struktur Birokrasi Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember khususnya Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan.....	63
Tabel 4.7 Gambaran Efektifitas Implementasi Peraturan Daerah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember khususnya Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan	64

Tabel 4.8	Hasil analisis data Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 6 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Lingkungan Kampus Universitas Jember khususnya Jalan Jawa dan Jalan Kalimantan	68
-----------	--	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edwards III	12
Gambar 2.2 Variabel Variabel-variabel yang Memengaruhi Proses Implementasi	18
Gambar 2.3 Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn.....	23
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	33
Gambar 4.1 Daerah PKL di Jalan Jawa dan Kalimantan.....	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	40

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- B. Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Politik dan Linmas Kabupaten Jember
- C. Pedoman Wawancara
- D. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima
- E. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2008
- F. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2008
- G. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/456/012/2009 Tentang Tim Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kab. Jember
- H. Peraturan Bupati Jember Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- I. Surat Peringatan PKL
- J. Hasil Rapat Koordinasi Penertiban Kawasan Lalu Lintas
- K. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penertiban Kawasan Lalu Lintas
- L. Surat Tugas Pelaksanaan Peraturan Bupati Dan Peraturan Daerah